**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang pemerintahannya dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Esensi dari sebuah demokrasi yaitu memastikan banyaknya partisipasi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Sorensen (Sahlan & Marwan, 2012) bahwa inti dari demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat politik serta terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Rakyat memiliki peranan penting dalam Negara demokrasi sebagai alat legitimasi. Demokrasi tanpa partisipasi langsung oleh rakyat menandakan bahwa demokrasi yang dianut tidak berjalan dengan ideal. Salah satu bentuk partisipasi yaitu memberikan hak suara ketika Pemilihan umum (pemilu) atau Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Keterlibatan rakyat dalam proses bernegara termasuk ikut serta dalam pemilu diharapkan dapat memberikan timbal balik yang positif bagi masyarakat. Fromm (Alwisol, 2011) memberikan saran dalam proses peran serta masyarakat tersebut dengan istilah *humanistic communitarian socialism* (sosialisme komunitarian humanistik), yaitu individu yang hidup bermasyarakat yang bergaul dengan cinta dan berakar dalam hubungan persaudaraan dan solidaritas. Individu pada masyarakat tersebut mencapai perasaan diri dan mampu berbuat kreatif. Setiap individu berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Terdapat *humanistic management* di mana individu sebagai anggota masyarakat berkumpul dalam kelompok membahas isu politik dan sosial serta menyarankan kebijakan terhadap pemerintah. Pada konteks tersebut menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses bernegara, yaitu ikut menentukan nasib Negara melalui proses politik. Peran masyarakat salah satunya melalui proses pemilihan umum, masyarakat dianggap penting untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya.

Pemilihan umum yang menempatkan masyarakat sebagai pemilih langsung, diharapkan akan melahirkan pemimpin yang bijak, pemimpin yang dapat merasakan penderitaan rakyat, serta dapat memberikan peluang bagi kesejahteraan rakyat. Menurut Subanda (2009) kenyataan yang ada sekarang justru jauh dari harapan tersebut, ketika nasib rakyat tidak terakomodir, kepemimpinan politik justru melahirkan binalitas politik, dimana politik tersebut akan menjadi dangkal, tawar, dan sia-sia karena mengedepankan nafsu dan kepentingan pragmatis. Selain karena calon pemimpin yang tidak bekerja untuk hajat hidup orang banyak, juga partai politik sebagai institusi demokrasi telah melahirkan politik eksklusif bukan politik inklusif, ideologi yang tidak jelas, program yang tak terarah, manejemen partai yang tidak terorganisir, konsolidasi partai melalui rekrutmen dan pengaderan yang stagnan telah melahirkan kinerja politik yang jauh dari kesejahteraan sosial. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan masyarakat menarik diri pada proses pemilihan langsung. Masyarakat menarik diri dengan cara tidak ikut serta atau golput pada suatu proses pemilihan.

Imran (2004) menyatakan bahwa konsep golput merupakan akronim dari golongan putih. Golput merupakan suatu kekosongan, kenihilan atau, ketidakterkaitan sesuatu terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut jika dianalogikan dengan manusia sesuai yang dimaksudkan oleh John Locke adalah kertas putih, dalam artian bahwa individu tersebut bersih dan tidak dicemari oleh lingkungannya. Sahlan dan Marwan (2012) menyatakan bahwa golput merupakan pengingat bahwa pemerintah atau penguasa harus selalu mengingat bahwa mereka memiliki rakayat yang harus dipimpin. Kebahagiaan rakyat menjadi prioritas, sehingga kebijakan yang ditempuh juga harus berpihak kepada rakyat, bukan menghilangkan golput secara kuantitas sebagai ukuran moral politik.

Partisipasi pemilih yang rendah di dalam pemilihan umum juga dapat melahirkan seorang pemimpin. Hal tersebut tidak cukup karena rakyat bukan hanya membutuhkan pemimpin yang bersifat struktural, melainkan fungsional, dan spiritual. Hal tersebut menandakan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah hal yang otomatis akan tercipta ketika terjadi interaksi sesama manusia sebagai mahluk sosial. Pemimpin yang diinginkan oleh rakyat adalah individu yang unggul, memiliki kapasitas manajemen dan intelektual yang dapat membawa kerjasama dan kemajuan bagi komunitas yang dipimpin (Sahlan & Marwan, 2012).

Pahmi (2007) menyatakan bahwa golput telah ada di Indonesia pada pemilihan umum tahun 1955 namun golput hadir sebagai sebuah sikap politik pada tahun 1971. Kondisi tersebut ditandai dengan sikap sekelompok mahasiswa aktivis yang melakukan boikot terhadap pemilu. Arief Budiman yang memimpin kelompok mahasiswa pada saat itu mendeklrasikan sikap untuk golput. Ghonoe (Pahmi, 2007) menyatakan bahwa pada masa tersebut golput lahir sebagai bentuk protes terhadap sistem pemerintahan dan pemilu yang dinilai telah banyak melenceng. Pada masa Orde Baru (periode kepemimpinan Presiden Soeharto) hingga memasuki masa Reformasi (pasca Orde Baru) jumlah golput sudah menunjukkan terjadinya peningkatan. Data jumlah golput pemilu legislatif selama masa Reformasi disampaikan Eriyanto (2007) sebagai berikut: pemilu tahun 1999 jumlah golput 6,3 persen, pemilu tahun 2004 jumlah golput 15,9 persen, dan pada pemilu tahun 2009 jumlah golput sebanyak 29,1 persen.

**Sahlan dan Marwan (2012) menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kota sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2007 bahkan dimenangi oleh golput sebanyak 11 kali dari 26 pemilukada kabupaten atau kota yang berlangsung. Sebelas daerah tersebut adalah Kota Pekalongan dan Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Pemalang pada tahun 2005. Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Pari pada tahun 2006, serta serta Kabupaten Jepara pada tahun 2007. Rata-rata golput dari sebelas pemilukada tersebut sebesar 36,74 persen, jauh di atas perolehan suara bupati atau walikota terpilih yang hanya sebesar 26,10 persen. Data dari** Tempo Makassar (2013) menunjukkan, pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2008 jumlah partisipasi masyarakat kota Makassar hanya 53 persen.

**Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diolah oleh Kompas (2013) juga menunjukkan angka golput yang semakin meningkat pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Partsipasi masyarakat dalam pemilihan umum bahkan berbanding terbalik dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan dalam proses pemilihan tersebut. Tahun 1999 diikuti oleh 92,74 persen pemilih dengan anggaran Rp. 1,3 triliun. Tahun 2004 menelan anggaran Rp. 6,98 triliun dengan jumlah partisipasi pemillih 84,07 persen pada pemilihan legislatif dan menurun menjadi 78,23 persen pada pemilihan presiden tahap pertama, kemudian kembali turun menjadi 76,63 persen pada pemilihan presiden tahap kedua. Pada tahun 2009 anggaran meningkat menjadi Rp. 13,5 triliun dan jumlah partisipasi yang menurun menjadi 70,96 persen pada pemilihan legislatif, meskipun mengalami peningkatan pada pemilihan presiden, jumlah partisipasi hanya naik menjadi 72,56 persen.**

Subanda (2009) menyatakan bahwa golput merupakan pilihan yang tidak bijak, namun golput dinyatakan sebagai hak suara karena beberapa alasan sebagai berikut: *pertama*, pilihan untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja negara. *Kedua*, legitimasi kekuasaan calon terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat, dalam arti legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak valid dan bisa memunculkan pembangkangan dari rakyat di wilayah yang dipimpin. Pemilihan langsung yang diikuti rakyat merupakan bentuk pilihan atau melakukan apa yang dikehendaki oleh kandidat terpilih karena dipilih oleh rakyat. Hal tersebut menjadi sumber masalah bagi golput karena golput tidak mempunyai substansial dan prosedural yang sah dan dipandang sebagai kegagalan proses demokrasi. *Ketiga*, golput adalah bentuk keluhan terhadap keadaan yang ada. Golput membuat pemilih memandang sebelah mata nilai demokrasi, dalam arti demokrasi tidak rusak dan juga tidak diperbaiki dengan adanya golput. Keberadaan golput adalah fenomena tawar menawar harga demokrasi dan hal tersebut merupakan bagian dari hak politik.

Eriyanto (2007) menyatakan pendapat yang berbeda, golput dibagi menjadi tiga berdasarkan alasan terjadinya. *Pertama* yaitu alasan administratif, seorang pemilih tidak menggunakan hak pilih karena terbentur masalah administrasi, yang dimaksud adminisitrasi seperti tidak tahu nama terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak mendapat kartu pemilih atau kartu undangan. Hal tersebut menunjukkan adanya kekacauan sistem administrasi pendaftaran pemilih. Seseorang bisa saja tidak mendapat kartu pemilih sekalipun telah memenuhi syarat

*Kedua* yaitu alasan teknis. Seseorang yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak memiliki waktu untuk memilih, misalnya harus bekerja di hari pemilihan, memiliki keperluan yang mendesak, harus ke luar kota di saat hari pemilihan, dan tidak pergi ke tempat pemungutan suara karena lokasinya dianggap jauh. *Ketiga* yaitu alasan politis, pada alasan politis ini pemilih memilih golput meskipun terdaftar secara sah dan memiliki kartu pemilih, juga tidak terkendala masalah teknis yaitu memiliki waktu yang luang untuk menggunakan hak pilih serta tidak mempermasalahkan masalah jarak TPS namun pemilih dengan sengaja tidak ingin menggunakan hak pilihnya.

Data yang diperoleh peneliti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar mengenai jumlah golput pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 22 Januri 2013, menunjukkan angka golput sebesar 40,64. Peneliti kemudian melakukan survey menggunakan angket yang dilakukan pada bulan Februari 2013 hingga Mei 2013. Survey tersebut diperoleh secara acak dari 100 warga kota Makassar yang memilih golput, hasilnya menunjukkan bahwa perilaku golput di Kota Makasar pada pemilihan gubernur tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politis dengan kontribusi sebesar 65 persen. Golput karena faktor teknis sebanyak 25 persen, dan golput karena faktor administrasi sebanyak 10 persen.

Perilaku golput merupakan sebuah wujud dari sikap memilih. Pemilih yang memilih golput tersebut dipengaruhi oleh persepsi terhadap sistem politik dan calon yang ada. Persepsi tersebut berasal dari informasi yang diperoleh masyarakat, baik tentang sistem maupun tentang calon yang maju pada sebuah pemilihan. Peran persepsi di dalam penentuan sikap golput tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian Bawono (2008) yang menyatakan bahwa semakin baik persepsi terhadap Pemilu maka perilaku pemilih semakin baik dalam partisipasinya.

Penelitian tersebut menyiratkan bahwa masyarakat sebagai pemilih dipengaruhi oleh informasi atau stimulus yang ada. Stimulus tersebut yang kemudian dipersipkan oleh masyarakat hingga akhirnya menjadi pertimbangan dalam memilih golput. Hal tersebut dijadikan titik tolak dalam penelitian ini bahwa mengetahui persepsi masyarakat yang melatarbelakangi sikap golput adalah hal yang urgen, mengingat jumlah pemilih golput yang cenderung mengalami peningkatan serta peran Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi. Peneliti kemudian mencoba untuk mengungkap fenomena ini dengan mengangkat judul “Fenomena Golongan Putih (Golput) dalam Pemilukada (Perspektif Fenomenologi di Kota Makassar)”.

1. **Fokus Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian yang dikemukakan oleh peneliti, maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi subjek sehingga memilih golput?
2. Bagaimana makna golput bagi subjek?
3. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, sehingga penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi subjek sehingga memilih golput.
2. Untuk mengetahui bagaimana makna golput bagi subjek.
3. **Manfaat Penelitian**
4. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya khasanah secara teoritis dalam ilmu pengetahuan, khususnya kajian mengenai fenomena golput yang terjadi. Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan gambaran serta kontribusi bagi disiplin ilmu psikologi terkhusus bagi psikologi sosial.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Penyelenggara

Penelitian ini dapat memberikan saran kepada pihak penyelanggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai latar belakang masyarakat sehingga memilih golput. Hal tersebut kemudian dapat dijadikan acuan agar jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan.

1. Bagi Partai Politik

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai persepsi pemilih terhadap partai politik sehingga partai politik dapat meningkatkan fungsinya sehingga lebih mendapatkan dukungan dari masyarakat.

1. Bagi Politisi

Penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi politisi mengenai perilaku dan sikap apa yang telah dilakukan sehingga masyarakat memilih golput.

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan menuangkan dalam bentuk tulisan. Peneliti berharap dapat mengetahui lebih dalam mengenai alasan psikologis subjek dalam memilih golput, dan bagaimana subjek memaknai sikap golput tersebut.